



▶ ALOKASI DANA DESA

## Pagu Tahun Ini Lebih Besar Rp3,5 Miliar

WONOSARI — Pemkab Gunungkidul akan menggelontorkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD 2025 sebesar Rp123,9 miliar. Pagu ini mengalami kenaikan sekitar Rp3,5 miliar ketimbang alokasi yang digelontorkan pada 2024.

Kepala Bidang Bina Perencanaan Keuangan dan Kekayaan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul

Waziroh mengatakan pagu ADD di tahun ini sudah dimasukkan dalam program kegiatan yang tercantum di APBD 2025. Total anggaran yang digelontorkan untuk 144 kalurahan mencapai Rp123,941 miliar.

Untuk setiap kalurahan menerima alokasi yang berbeda-beda dikarenakan ada formulasi khusus dalam penghitungannya. Namun, berdasarkan ketetapan yang ada, besarnya mulai dari Rp600 jutaan hingga di

atas Rp1 miliar.

“Memang yang diterima setiap kalurahan tidak sama. Misalnya, Pacarejo di Kapanewon Semanu, ADD yang diterima sebesar Rp1,4 miliar. Di Kalurahan Girijati, Purwosari pagunya di kisaran Rp650 jutaan,” ungkapnya, Jumat (24/1).

Wasitoh menjelaskan pagu ADD yang digelontorkan tahun ini lebih tinggi ketimbang penyaluran pada 2024. Tahun lalu, total yang diberikan ke kalurahan di

Gunungkidul sebesar Rp120,4 miliar.

Selain mengacu kepada kemampuan keuangan daerah, kenaikan juga terjadi karena adanya penyesuaian kenaikan upah minimum kabupaten sebesar 6,5%.

Berdasarkan keputusan tersebut, maka staf yang merupakan pegawai dengan penghasilan tetap terendah di kalurahan mendapatkan bayaran sesuai dengan UMK yang berlaku.

“Untuk lurah dan pamong lainnya, kenaikan siltap di kisaran Rp70.000 per bulannya. Jadi, kenaikan siltap ini ikut berpengaruh terhadap penyaluran ADD di 2025,” katanya.

Lurah Pacarejo Suhadi memaparkan dana ADD dari Pemkab Gunungkidul memang sudah seharusnya ada kenaikan. Hal ini tak lepas dengan kebijakan menaikkan siltap yang berlaku pada 2025.

“Kalau mengacu pagu pada

2024 dapat alokasi Rp1,3 miliar. Kalau tidak naik dan harus melakukan penyesuaian siltap, maka tahun ini defisit sekitar Rp35 juta. Jadi, pagu ADD memang harus dinaikan,” tuturnya.

Suhadi menambahkan keberadaan ADD tidak hanya membiayai siltap pamong maupun staf di kalurahan karenajuga untuk operasional pemerintahan hingga pembinaan kepegawaian. (David Kurniawan)